



Koordinasi PT Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero dan Kepolisian Resort Lhokseumawe dalam Pengamanan Aset Perusahaan

Sayed Nazri Akbar¹ , Februati Trimurni² 

¹ Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

² Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

Corresponding Author: februati@usu.ac.id

INFO PASAL

Log Artikel:

Diterima: 11 Desember 2024

Direvisi: 27 Desember 2024

Dipublikasi: 27 Desember 2024

Tersedia online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN:xxx

P-ISSN:xxx

Kutipan:

Akbar, S. N., & Trimurni, F. (2024). Koordinasi PT Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero dan Kepolisian Reso Rt Lhoksemauwe dalam Pengamanan Aset Perusahaan. *Sajjana: Public Administration Review*.

ABSTRAK

PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2007 masih memiliki karyawan yang bekerja untuk merawat dan menjaga aset-aset perusahaan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun yang menjadi masalah adalah tingkat keamanan PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) masih kurang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat keamanan PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) dilakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menjaga keamanan perusahaan serta masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi dan kendala PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero dan Kepolisian Resort Lhokseumawe dalam Pengamanan Aset Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana lokasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu di PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber data dan pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori Hasibuan yang mengemukakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dapat dilihat melalui kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses koordinasi yang dilakukan antara PT KKA dan Kepolisian Resor Lhokseumawe terjadi ketidaksadaran dalam bekerja, kurang komunikasi, masih terdapat kesenjangan yang terjadi dilapangan oleh kedua instansi tersebut yang disebabkan karena masih kurangnya pembagian kerja yang dilakukan oleh kepala bagian dan kedisiplinan yang perlu ditingkatkan. Juga ditemukan bahwa tidak adanya sebuah lembaga yang mengawasi koordinasi antara kedua belah pihak dari instansi terkait. Serta tidak adanya koordinator yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan. Diharapkan PT KKA harus lebih memperhatikan kesatuan tindakan terkait dengan kesadaran bagi anggota instansi, komunikasi yang lebih intens, pembagian kerja yang lebih detail serta kedisiplinan yang lebih tegas sehingga terciptanya lingkungan kerja yang baik.

Kata kunci: Penempatan tenaga kerja, Disabilitas, Tim ULD, Dinas Ketenagakerjaan

ABSTRACT

PT. Kertas Kraft Aceh (KKA), which has not been operating since 2007, still has employees who work to care for and maintain the company's assets and provide services to the community. However, the problem is the level of security of PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) is still lacking. Therefore, to increase the security level of PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) is coordinated with the Police to maintain the security of the company and the community. The aim of this research is to determine the coordination and obstacles of PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero and Lhokseumawe Resort Police in Securing Company Assets. This research uses qualitative research methods where the location to obtain the data needed in this research is at PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero, North Aceh Regency, Nanggroe Aceh Darussalam Province. This research uses a purposive sampling technique to determine research informants. This research uses a type of triangulation of data sources and data collection. The data obtained was then



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

analyzed qualitatively using Hasibuan's theory which suggests that the factors that influence coordination can be seen through the unity of action, communication, division of work and discipline. The results of the research show that in the coordination process carried out between PT KKA and the Lhokseumawe Police there was a lack of awareness in work, lack of communication, there were still gaps in the field between the two agencies which was caused by a lack of division of work carried out by section heads and the necessary to improved the discipline. It was also found that there was no institution that supervised coordination between the two parties from the relevant agencies. And there is no coordinator who serves as a guide in carrying out tasks in the field. It is hoped that PT KKA will pay more attention to unity of action related to awareness for agency members, more intense communication, more detailed division of work and stricter discipline so as to create a good work environment

Keyword: *Coordination, Security Service, BUMN*

1. Latar Belakang

Perusahaan negara di Indonesia memiliki sejarah panjang, berawal dari era kolonial Belanda dengan kehadiran VOC yang menandai keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi. Pasca kemerdekaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan krusial dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Landasan hukum BUMN tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Perpu No. 19 Tahun 1960, UU No. 19 Tahun 1969, dan UU No. 19 Tahun 2003. UU No. 9 Tahun 1969 mengklasifikasikan perusahaan negara menjadi tiga bentuk: Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero), sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. UU No. 19 Tahun 2003 menegaskan bahwa Persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan modal saham yang seluruhnya atau minimal 51% dimiliki negara, dengan tujuan utama mengejar keuntungan. Sebagai BUMN, Persero memiliki tanggung jawab pelayanan publik yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 19 Tahun 2003 dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kepentingan umum menjadi landasan penting bagi Persero dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jumlah BUMN di Indonesia yang mencapai 146 pada tahun 2021 direncanakan akan dirampingkan menjadi 107, dengan target akhir 80 perusahaan. Efisiensi ini bertujuan meningkatkan profitabilitas BUMN sebagai sumber pendanaan utama pemerintah.

Provinsi Aceh, yang sempat tertinggal pasca kemerdekaan, mengalami industrialisasi pada tahun 1970-an dengan berdirinya berbagai pabrik, seperti PT. Arun, PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Asean Aceh Fertilizer (AAF), PT. Kertas Kraft Aceh (KKA), dan pabrik semen di Banda Aceh. Perusahaan-Perusahaan ini pun banyak mengalami kendala seperti perusahaan PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) yang berhenti beroperasi sejak 2007. Meskipun Presiden Jokowi berkomitmen untuk menghidupkan kembali KKA, hingga saat ini perusahaan tersebut belum beroperasi penuh. KKA masih memiliki karyawan yang bertugas merawat aset dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti penyediaan air bersih dan keamanan.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Fakhurrazi Ihsan (2018), Dewi Risnawati (2017), dan Andrianto (2018), menunjukkan bahwa pengelolaan aset seringkali menghadapi kendala, baik internal maupun eksternal. Hasil pra-penelitian di PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) menunjukkan bahwa meskipun KKA memberikan pelayanan kepada masyarakat, tingkat keamanan di lingkungan perusahaan masih rendah. Pada tahun 2020, terjadi kasus pencurian yang melibatkan sembilan pelaku, di mana pihak kepolisian hanya berhasil menangkap satu orang. Kondisi perumahan yang gelap dan terpencil menjadi faktor pemicu tindakan kriminal.

Pencurian aset, seperti kabel tembaga dan besi, merugikan perusahaan dan mengganggu aktivitas operasional. PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) telah berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Lhokseumawe untuk meningkatkan keamanan, namun upaya tersebut belum optimal. Aset, sebagai barang bernilai ekonomi, penting bagi keberlangsungan perusahaan. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menegaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah, menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial di masa depan, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset juga mencakup sumber daya non-keuangan dan sumber daya bernilai sejarah dan budaya. Pemeliharaan dan pengamanan aset PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) yang kerap menjadi permasalahan membuat PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) menjalankan koordinasi bersama pihak kepolisian setempat untuk menjaga aset PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) untuk menjaga aset perusahaan. Koordinasi tersebut meliputi pembagian jadwal penjagaan, penetapan titik lokasi pos penjagaan, dan penentuan jumlah personel

keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis koordinasi PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero dan Kepolisian Resort Lhokseumawe dalam pengamanan aset perusahaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji koordinasi PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero dan Kepolisian Resort Lhokseumawe dalam meningkatkan keamanan warga Desa Jamuan, Aceh Utara. Sesuai pendapat Bogdan dan Taylor (Moleong, 2005:3), metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau perilaku yang diamati.

Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam menghadapi realitas yang kompleks, hubungan langsung antara peneliti dan responden, serta kepekaan terhadap nilai-nilai yang dihadapi. Fokus penelitian adalah mendeskripsikan koordinasi antara PT. KKA dan Kepolisian Resort Lhokseumawe dalam meningkatkan pelayanan keamanan bagi warga Desa Jamuan.

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian didasarkan pada masalah yang terjadi di lapangan. Lokasi yang ditentukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu di PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero, Provinsi Aceh, Aceh utara.

2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data menurut Noor (2011:138) merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

1. Wawancara

Wawancara, sebagai metode pengumpulan data, terbagi menjadi dua jenis: tak terstruktur (mendalam, terbuka) dan terstruktur (baku, terpimpin). Wawancara tak terstruktur bersifat fleksibel, sedangkan wawancara terstruktur menggunakan pertanyaan dan pilihan jawaban yang telah ditentukan.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang mau diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) dokumentasi yaitu teknik pengumpulan dengan menanamkan dokumen-dokumen yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan tersaji dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

2.3 Penentuan Informan

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, sebagaimana dijelaskan menurut Arikunto (2004:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan yang memahami informasi tentang objek penelitian ini. Oleh karena itu, informan di dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh informasi terkait dengan judul penelitian yang telah ditetapkan.

NO.	Informan Penelitian	Informasi Yang Dibutuhkan	Jumlah
1.	Kepala Bagian Humas PT. KKA	Kebijakan yang di dibuat oleh perusahaan terkait Pelayanan yang diberikan ke masyarakat.	1

NO.	Informan Penelitian	Informasi Yang Dibutuhkan	Jumlah
2.	Kepala Bagian Divisi Keamanan PT. KKA	Bentuk koordinasi yang dilakukan dengan aparaturnya kepolisian.	1
3.	Kepala Satuan Keamanan PT. KKA	Standar dan sasaran koordinasi yang dilakukan.	1
4.	Polisi yang melakukan PAM di PT. KKA	Standar dan sasaran program yang dijalankan.	2
5.	Masyarakat Desa Jamuan	Dampak yang diterima masyarakat terkait koordinasi yang dilakukan.	3

Tabel 2.1 Matriks Informan
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.. Dalam melakukan analisis data, ada langkah-langkah yang dilakukan menurut Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data Data yang diperoleh segera peneliti analisis melalui reduksi data. mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hal ini mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian Data Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Penarikan Kesimpulan Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. jadi teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data dengan melakukan Analisa terhadap masalah yang ditemukan di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti kemudian menarik kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Koordinasi PT Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero Dan Kepolisian Resort Lhokseumawe Dalam Pengamanan Aset Perusahaan

PT Kertas Kraft Aceh (Persero) didirikan dalam rangka swasembada pengadaan kertas kantong semen di dalam negeri, dan disisi lain ikut serta dalam menunjang peningkatan ekspor non-migas. PT Kertas Kraft Aceh dengan kapasitas terpasang 135.000 Ton pertahun dibangun didaerah zone industri Lhokseumawe, Aceh Utara dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang ada didaerah Aceh antara lain Pinus sebagai bahan baku kayu dan gas alam sebagai sumber bahan bakar.

Dengan keberadaan industri kertas di daerah Pemerintah Aceh diharapkan dapat memacu peningkatan perekonomian didaerah ini. Dan sebagai penggerak dan stabilisator pembangunan nasional, akan memberikan hasil dan manfaat yang 60 dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Faktanya PT KKA sudah mengalami masa krisis sejak tahun 2011, PT KKA

berhenti memproduksi kertas semen. Dan pada tahun 2017 dialihkan sebagai sumber tenaga tambahan untuk Perusahaan Listrik Negara di area Aceh Utara.

Masa krisis ini mempengaruhi eksistensi PT KKA sebagai badan yang mendukung keberlangsungan kesejahteraan masyarakatnya. Selain mensejahterakan masyarakat, mempermudah akses masyarakat juga menjadi poin penting bagi sebuah BUMN. Di antaranya penyediaan listrik serta air yang menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Kondisi serta lokasi PT KKA membuat aset serta Objek Vital membutuhkan perhatian khusus. Dengan adanya kesepakatan antara PT Kertas Kraft Aceh dan Kepolisian Resort Lhokseumawe dalam pengamanan aset perusahaan. Keamanan aset yang vital pada perusahaan menjadi lebih terjaga. Dengan demikian PT KKA dan Kepolisian Resor Lhokseumawe perlu mempertimbangkan koordinasi yang berfungsi untuk menjaga keamanan masyarakat serta aset sebagai objek vital dengan Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin.

3.1 Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan merupakan kesatuan dari pada usaha bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari setiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan juga merupakan kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan 61 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Di dalam pelaksanaannya pemimpin harus memiliki usaha-usaha kreatif dan memiliki inisiatif dalam menyadarkan anggotanya dalam melaksanakan koordinasi di lapangan. Kreativitas yang dimaksudkan bahwa seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru, sebagai kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya.

Kesatuan tindakan dari unit-unit kerja organisasi dan individu dapat dicapai dengan baik, apabila ada komunikasi sebagai sumber informasi untuk melakukan tindakan. Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi antara PT KKA dan Kepolisian Resor Lhokseumawe bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap tindakan individu sehingga terdapat keserasian didalam mencapai hasil. Dari hasil wawancara terkait kesatuan tindakan peneliti mewawancarai dari Pihak Kepolisian Resor Lhokseumawe, bapak AP selaku Brigpol, beliau mengatakan:

“Untuk membuat sebuah kesatuan tindakan sepertinya sedikit sulit karena banyak faktor diantaranya sarana dan prasarana serta sumber daya yang tidak terlalu berkecukupan. Membuat beberapa kali sering terjadinya miss direction yang memberikan dampak yang tidak terlalu baik. Kesadaran pada setiap pihak memang perlu namun sering terjadi Ego dalam struktural sehingga lebih dominan tidak terbuka antara satu pihak. Hal ini membuat selama keberlangsungan proses kesepakatan memberikan hasil yang tidak maksimal.” (wawancara bapak AP pada tanggal 15 Juli 2023)

Jadi dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa pentingnya kesadaran bagi setiap anggota instansi untuk saling menyesuaikan agar terhindar dari tumpang tindih, namun pada kenyataannya masih terdapat kurangnya kesadaran diri dari sebagian anggota keamanan PT KKA terbukti dengan tidak terlalu mengindahkan sifat dari kesatuan tindakan, dimana masih terdapat tingkatan yang memiliki wewenang tidak memberikan satu suara atau satu tindakan. Dalam memberikan informasi data terkait dengan kasus pengamanan aset. Hal ini memberikan efek yang berlanjut kepada masyarakat. Penanganan masalah yang dilakukan menjadi bias, lebih rincinya keamanan bagian mana yang harus di fokuskan. Selanjutnya wawancara ditujukan kepada TI, beliau mengatakan bahwa :

“Pernah saya mendengar suara galian di dekat rumah saya, melakukan pelaporan kepada pihak keamanan yang bertugas, namun saya mendapatkan respon yang sedikit terlambat. Sehingga besok paginya galian itu sudah terbentuk.” (wawancara dengan TI pada tanggal 11 Juli 2023).

Dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa ketidaksadaran bagi setiap anggota instansi itu juga timbul, terbukti dengan adanya keterlambatan dalam merespons pihak pelapor khususnya kasus pencurian, inilah yang kemudian menghambat dalam kelancaran proses koordinasi dalam Pengamanan Aset perusahaan. Menurut keterangan dari pihak kepolisian. Kepolisian memiliki sifat untuk membantu pihak PT KKA

melakukan pengamanan. Hal ini serupa dengan bapak I.S selaku kepala bagian humas PT KKA, mengatakan bahwa :

“Pihak kepolisian memiliki jadwal yang sudah diatur oleh pihak kepolisian langsung melalui SP atau Surat Perintah, sedangkan pihak keamanan dari pihak PT KKA langsung dibuat oleh orang yang memiliki wewenang. Jadwal untuk kedua instansi dibuat sedikit fleksibel bebeapa waktu lalu. Mungkin ini penyebab dari slow respon yang diberikan oleh pihak keamanan. Namun bukan berarti pengawasan tidak dilakukan, akan tetapi lebih fokus pada area yang dijaga.”(wawancara dengan bapak IA pada tanggal 20 Juli 2023).

Jadi dari hasil wawancara peneliti dengan bapak komisaris peneliti adalah penyebab slow respon yang diberikan adalah efek dari penyesuaian jadwal serta area yang tidak tetap. Hal ini memberikan efek penjagaan menjadi memiliki celah. Hal ini juga selaras dengan yang di sampaikan oleh IA sebagai masyarakat, beliau mengatakan bahwa :

“Saya pernah melakukan pengejaran dengan ayah saya karena kebetulan kami yang liat pencurian tersebut. Saat kami melakukan kami memberikan informasi kepada salah satu pihak keamanan dari PT KKA namun mereka datang sedikit terambat.”(wawancara dengan IA pada tanggal 20 Juli 2023)

Namun sejauh ini dalam proses koordinasi antar instansi masih terdapat tumpang tindih antar instansi yaitu dengan adanya ketidaksadaran bagi setiap anggota instansi untuk saling menyesuaikan dalam bekerja dan juga terdapat ego sektoral. Terbukti dengan adanya tindakan yang dilakukan anggota instansi di luar dari arahan pimpinan. Tindakan di luar arahan pimpinan yang dimaksud adalah tindakan untuk merespons apa yang dilaporkan dan apa tindakan yang harus dilakukan. Hal ini menyebabkan keterbatasan dari kedua pihak serta memberikan efek saling tidak terbuka antar pihak instansi. Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses koordinasi yang dilakukan antara PT KKA dan Kepolisian Resor Lhokseumawe terjadi ketidaksadaran dalam bekerja, dimana beberapa pihak keamanan PT KKA yang bertugas terlalu sering tidak merespons permintaan informasi dari pihak Kepolisian Resor Lhokseumawe menimbulkan ketidaksempurnaan dalam melakukan koordinasi. Jika melihat struktur fungsional dan pembagian tugas yang selaras dengan kesatuan tindakan dimana pemimpin yang mempunyai wewenang dalam mengatur usaha-usaha dari setiap individu, peneliti mewancarai bapak SM selaku Kepala Divisi Operasi 1 beliau mengatakan:

“Pihak perusahaan sudah berusaha untuk memberikan arahan kepada orang-orang yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan aset serta memperhatikan keamanan masyarakat. Arahan-arahan ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tentu pada proses ini tidak semua berjalan dengan baik. Tentu ada faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapai sesuai dengan yang di harapkan.”(wawancara dengan bapak SM pada tanggal 17 Juli 2023).

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses koordinasi antara PT KKA dan Kepolisian Resor Lhokseumawe, seorang pimpinan selalu memberikan arahan-arahan kepada anggota-anggotanya. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan koordinasi antar instansi dalam pengamanan aset dapat menimbulkan kesadaran bagi setiap anggota instansi kemudian melahirkan hasil yang efektif.

Pembahasan dalam proses koordinasi yang terjadi di lapangan peneliti dapat mengatakan bahwa proses koordinasi yang dilakukan antara PT KKA dengan Kepolisian Resor Lhokseumawe, sejauh ini pengamanan aset sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun dalam kesatuan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin untuk mencegah terjadinya tumpang tindih di lapangan itu belum efektif, pemimpin hanya memberikan arahan untuk tetap menjaga komunikasi dan fokus pada tujuan tanpa memiliki kreatifitas atau inisiatif dalam meminimalisir terjadinya tumpang tindih antar instansi. Peneliti mengatakan bahwa pentingnya seorang pemimpin dalam melakukan koordinasi dengan adanya kreatifitas dan inisiatif untuk mencapai hasil yang efektif, hal tersebut sebagai langkah dalam mengurangi masalah-masalah dalam koordinasi bahwa seorang bawahan dalam bekerja sepenuhnya hanya berkiblat pada petunjuk seorang pimpinan.

Sebagaimana menurut Mc. Farland (dalam Rukmanayanti 1985: 89), mengatakan bahwa dalam koordinasi pimpinan mengembangkan pola usaha-usaha antar instansi secara teratur di antaranya bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Maka dengan adanya usaha-usaha (kreatifitas dan inisiatif) yang dilakukan seorang pemimpin akan mewujudkan proses koordinasi yang baik dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Namun kenyataannya di lapangan tidak terdapatnya koordinator yang menjadi pihak yang memberikan arahan serta tempat komunikasi berlangsung.

3.2 Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Pengertian ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang atau manusia, sehingga komunikasi seperti ini disebut sebagai *Human Communication* (komunikasi manusia). meskipun banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, namun dari semua definisi itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik langsung (komunikasi tatap muka) maupun tidak langsung (komunikasi melalui media). Dari definisi tersebut tersimpul bahwa tujuan komunikasi dalam pengertian paradigmatic adalah untuk mendapatkan efek tertentu pada komunikan. Termasuk didalamnya adalah bentuk dari komunikasi yang dilakukan, terdapat didalamnya komunikasi organisasi dan komunikasi massa yang dapat digunakan oleh PT. Kertas Kraft Aceh dan Kepolisian Resort Lhokseumawe.

Berdasarkan jenisnya, komunikasi ada 2 jenis yaitu komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Komunikasi organisasi merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun nonformal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi, yang mana membahas tentang struktur serta pola pada sistem komunikasi tersebut. Serta komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Jadi, Komunikasi massa sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Kepala Humas PT. Kertas Kraft Aceh berdasarkan hasil wawancara yaitu:

“Komunikasi yang kita lakukan lebih sering dilakukan oleh posisi tertentu baru disalurkan kepada pihak yang dibawahnya, fungsinya untuk menghindari tumpang tindih informasi yang akan disebar baik pada pihak terkait atau pihak masyarakat” (wawancara dengan Kepala Humas PT. Kertas Kraft Aceh pada tanggal 17 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak PT. Kertas Kraft Aceh adalah bentuk dari komunikasi organisasi yang mana informasinya dilakukan secara terorganisir terkait dengan kepada siapa informasi tersebut akan diperoleh juga siapa yang dapat informasi secara menyeluruh apakah informasi tersebut dapat disebarluaskan atau tidak. Komunikasi antara perusahaan dan kepolisian memiliki dampak positif dalam memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan. Perusahaan sering berkolaborasi dengan kepolisian untuk meningkatkan keamanan fisik, mengidentifikasi potensi risiko, serta merancang strategi pengamanan yang efektif. Komunikasi organisasi ini mungkin melibatkan pertemuan berkala atau penyediaan laporan keamanan. Kerjasama ini memungkinkan perusahaan dan kepolisian untuk saling bertukar informasi dan bekerja sama dalam mencegah dan menanggapi tindakan kriminal. Komunikasi organisasi yang baik antara perusahaan dan kepolisian memainkan peran penting dalam membangun lingkungan bisnis yang aman dan mendukung keberlanjutan hubungan positif antara entitas bisnis dan lembaga penegak hukum. Keterlibatan bersama ini mempromosikan saling pengertian, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial, yang pada gilirannya dapat menghasilkan manfaat positif bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam penggunaan media komunikasi, Penggunaan alat bantu media komunikasi yang mencakup teknologi canggih tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam berkomunikasi, tetapi juga memperkuat kerjasama dan respon terhadap berbagai situasi keamanan. Keberhasilan penggunaan alat bantu ini terletak pada integrasi yang baik antara teknologi dan strategi komunikasi, yang pada gilirannya dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak kepolisian dengan jabatan pimpinan regu, beliau mengatakan:

“Komunikasi yang kami lakukan biasanya dari pihak PT. Kertas Kraft Aceh apakah ada pengdelegasian perubahan atau tidak, juga apakah ada informasi yang bersifat lebih tertutup. Biasanya kami melakukan komunikasi ini melalui beberapa media. Diantaranya adalah Handphone atau HT (Handy Talky) akan tetapi penggunaan HT memiliki keterbatasan, salah satunya jangkauan

area yang tidak terlalu jauh serta sifatnya sementara. Untuk keseharian kami lebih sering menggunakan Handphone sebagai media komunikasi antara sesama regu maupun kepada Instansi terkait.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa dalam melakukan komunikasi. Pihak satu dan kedua menggunakan alat bantu media, diantaranya Handphone dan HT (*Handy Talky*). Hal ini menjelaskan bahwa dalam koordinasi ini pihak terkait menggunakan bentuk komunikasi massa yang mana didalamnya terdapat alat bantu media walaupun tidak difungsikan secara massa. Penggunaan alat bantu tentu membantu dalam proses pengawasan yang dilakukan serta membantu dalam penyebaran informasi yang didalamnya terdapat komunikasi internal maupun eksternal.

Penggunaan alat bantu memudahkan pihak yang melakukan pengawasan dalam bertukar informasi serta penggantian shift kerja. Hal ini juga disampaikan oleh pihak kepolisian yang menjadi anggota dari regu pengawasan. Beliau mengatakan:

“Setiap hari pihak yang melakukan penjagaan serta pengawasan memiliki shift kerja atau jam kerja. Tidak bisa setiap habis jam kerja langsung meninggalkan area, harus kita informasikan kepada regu selanjutnya. Hal ini dikomunikasikan kepada kepala regu atau rekan tim dari pihak instansi terkait. Walaupun kami punya jadwal tapi pergantian shift ini harus diinformasikan, apakah nantinya ada pihak yang tidak bisa hadir tepat waktu atau berhalangan untuk hadir”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pihak kepolisian mengatakan bahwa pergantian shift harus dilaporkan untuk menghindari posisi yang secara tiba-tiba berhalangan hadir. Komunikasi juga dilakukan secara vertikal, jika anggota berhalangan hadir maka informasi tersebut harus sampai kepada atasan, jika memiliki kondisi yang mendesak bisa disampaikan kepada pihak satu tim yang melakukan pengawasan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Kepala Divisi Operasi I, beliau mengatakan:

“Terkadang ada informasi yang susah kita terima pada saat kami punya kesibukan tersendiri, salah satunya saat rapat serta tidak dalam jangkauan perusahaan. Jadi situasi yang tidak terkontrol ini bisa di wakikan kepada tim satu regu dan diinformasikan kembali dalam jangka waktu tertentu atau hari selanjutnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala divisi operasi I, hal ini menjelaskan bahwa komunikasi itu penting dilakukan baik menggunakan media atau tidak. Terkait dengan tugas yang dilakukan yaitu pengawasan aset perusahaan. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik maka tentu akan memberikan efek berkelanjutan yang mana didalamnya ada efek kerugian jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Proses komunikasi yang didalamnya terdapat banyak orang tentu memiliki hambatan serta kendala tersendiri. Hal ini juga disampaikan oleh bapak AS sebagai Kepala Satuan Keamanan, beliau mengatakan:

“Informasi yang disampaikan ada yang bisa diketahui oleh kepalanya saja dan ada juga yang bisa diketahui oleh seluruh anggota. Akan tetapi informasi yang bisa diketahui oleh kepala bagian saja kadang bisa diketahui oleh anggota-anggota. Belajar dari pengalaman yang sudah terjadi karena keterbatasan media yang dimiliki. Terkadang kalau lagi mati listrik dan situasi hujan kami memiliki kesulitan dalam berkomunikasi, jadi kami menggunakan HT sebagai pilihan. Akan tetapi karena menggunakan HT tentu pada saat informasi disampaikan orang yang berada disekitar akan ikut mengetahui. Biasanya hal-hal yang tidak bisa diketahui secara massa adalah adanya pergerakan pencurian”

Hal ini juga menjelaskan bahwa keterbatasan dalam sarana serta lokasi menjadi hambatan tersendiri bagi pihak PT. KKA dan Kepolisian dalam menjaga komunikasi. Hal ini juga menyebabkan tidak bisa menyampaikan informasi secara rahasia atau tertutup jika situasi yang disampaikan pada hasil wawancara tersebut sedang terjadi.

Dari analisis yang dilakukan terhadap proses komunikasi antara PT. Kertas Kraft Aceh dan Kepolisian Resort Lhokseumawe, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan. Komunikasi organisasi yang terstruktur dan terorganisir memungkinkan pertukaran informasi yang efisien, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi darurat. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan

media komunikasi, kesulitan dalam menyampaikan informasi secara rahasia, dan hambatan teknis selama situasi tertentu (misalnya, mati listrik atau cuaca buruk). Untuk meningkatkan efektifitas koordinasi, PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) dapat melakukan peningkatan infrastruktur, pelatihan komunikasi dan protocol komunikasi yang jelas. Komunikasi pada koordinasi merupakan kunci pada tingkat keberhasilannya, hal ini disampaikan sesuai dengan hasil pengamatan peneliti yang dilakukan pada lokasi penelitian. Komunikasi yang terjalin harus benar-benar terjalin dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Tidak hanya pada antara instansi juga pada satu tim regu yang bertugas. Komunikasi yang terjalin antar anggota harus berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman atau *miss communication*.

3.3 Pembagian Kerja

Pembagian kerja merupakan suatu strategi organisasi yang melibatkan pemisahan tugas dan tanggung jawab di antara individu atau kelompok untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Dengan merinci pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik, perusahaan dapat meningkatkan fokus, kecepatan, dan keterampilan pekerja.

Dalam melaksanakan program kerjanya, PT Kertas Kraft Aceh dan Kepolisian Resort Lhokseumawe juga memerlukan pegawai yang cakap, terampil dan berwibawa untuk menunjang tujuan organisasi. Dalam organisasi seorang kepala perlu melakukan penempatan kerja/pembagian kerja yang tepat agar pegawai bisa menggunakan kemampuan dan keahlian secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Hal tersebut sudah dilakukan oleh kepala bagian, dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan kepala divisi operasi I, beliau mengatakan:

“Bentuk pembagian kerja yang dilakukan selama terjalin koordinasi anatara perusahaan BUMN PT Kertas Kraft Aceh (Persero) dengan Kepolisian Resort Lhokseumawe, masing-masing instansi membuat daftar personil yang bertugas, karena personil polisi yang bertugas di objek vital jumlahnya sangat terbatas maka personil tersebut sifatnya membantu dan membaur dengan petugas keamanan yang ada dilapangan saat itu.”

Sesuai dengan yang telah disampaikan oleh bapak Divisi Operasi I, hal serupa juga disampaikan oleh pihak kepolisian, yaitu

“Polres Lhokseumawe mengeluarkan Surat Perintah untuk memenuhi permintaan PT Kertas Kraft Aceh dengan dasar koordinasi di bidang keamanan ojek vital, lalu pihak KKA memberikan jadwal piket selama satu bulan dengan jam kerja yang kondisional. Ada dua regu yang bertugas, masing-masing regu memiliki dua anggota, dan memiliki tanggung jawab penuh selama satu kali 24 jam.”

Kedua belah pihak sama-sama mendapatkan jadwal untuk melakukan keamanan yang akan diberikan oleh pihak PT Kertas Kraft Aceh perbulannya. Dengan demikian kedua belah pihak dapat sama-sama menjaga produktivitas dari masing-masing pihak. Pihak dari Polres Lhokseumawe mengikuti jadwal pengamanan pihak PT Kertas Kraft Aceh hal ini sudah tertera pada MOU yang sudah sama-sama disepakati. Hal ini tertera pada BAB III pasal 3 ayat 6 yang berisi Polres Lhokseumawe berkewajiban menjaga kegiatan di wilayah kerja operasional PT Kertas Kraft Aceh sehingga teripcatanya kondisi aman selama 24 jam dan penempatan personil mengikuti jadwal kerja shift dan patroli satuan pengamanan PT Kertas Kraft Aceh.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada PT Kertas Kraft Aceh dapat diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan yang terjadi dilapangan oleh kedua instansi tersebut. Timbulnya permasalahan di atas diduga disebabkan karena masih kurangnya pembagian kerja yang dilakukan oleh kepala bagian. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Humas PT Kertas Kraft Aceh.

Upaya selanjutnya dalam memaksimalkan kemampuan potensi sumber daya manusia pada suatu organisasi, yaitu dengan memberikan tempat bagi pegawai pada posisi yang sesuai kemampuannya dengan cara melakukan pembagian kerja sesuai porsi pada unit kerjanya. Dalam pembagian kerja tersebut, kegiatan dibagikan sesuai porsi kerja pada unit organisasi. Pembagian kerja dimaksud, yaitu upaya memudahkan seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang memungkinkan orang itu dapat mempelajari dan memiliki keterampilan kerja yang memadai, sehingga mampu bekerja dan berpengalaman dalam pekerjaannya untuk mendukung tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan pimpinan kepadanya. Sesuai dengan yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian, yaitu:

“Anggota kepolisian memahami tugas dan tanggung jawab mereka melalui perencanaan dan briefing. Masing-masing individu memiliki area tugas yang jelas, seperti patroli, investigasi, atau unit khusus tertentu. Ini memastikan bahwa setiap aspek keamanan diurus oleh personel yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus di bidangnya. Koordinasi antar unit atau bagian dilakukan melalui pertemuan rutin, komunikasi langsung, dan teknologi informasi. Setiap unit memiliki peran dan fungsi spesifik, dan ada saling ketergantungan untuk mencapai tujuan keseluruhan. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam memastikan informasi dan intelijen disampaikan secara tepat waktu.”

Pernyataan dari pihak kepolisian menegaskan pentingnya perencanaan dan briefing dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab anggota kepolisian. Setiap individu memiliki area tugas yang jelas, seperti patroli, investigasi, atau unit khusus, yang memungkinkan mereka untuk mengelola aspek keamanan dengan keahlian yang sesuai. Hal ini sebagaimana menurut Hasibuan (2007:33) pembagian kerja itu berkaitan dengan informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Pembagian kerja yang diuraikan dengan jelas dan terperinci sangat membantu pegawai dalam pelaksanaan tugas untuk menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga keahlian dalam pengalaman dan tanggung jawab yang dimiliki pegawai secara perlahan akan tumbuh dan meningkat menuju perbaikan kinerja secara menyeluruh.

3.4 Disiplin

Disiplin adalah landasan untuk menciptakan rutinitas yang konsisten, tanggapan yang efektif terhadap situasi darurat, dan lingkungan yang aman. Teori ini mengakui bahwa keamanan memerlukan upaya yang terorganisir, terstruktur, dan tersistematisasi untuk mengurangi risiko serta mencegah ancaman yang dapat merugikan. Disiplin dalam keamanan mencakup penghormatan terhadap protokol keamanan, pelaksanaan tugas rutin, dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan. Konsep ini juga mencakup tingkat kesiapan mental dan fisik untuk merespons situasi darurat dengan tepat, serta kemauan untuk meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Peneliti mewawancarai dari Pihak Kepolisian Resor Lhokseumawe, bapak AP selaku Brigpol, beliau mengatakan:

“Kami memiliki protokol dan pedoman yang jelas terkait keamanan. Setiap anggota tim keamanan mendapatkan pelatihan awal tentang standar dan prosedur ini. Disiplin diimplementasikan melalui penerapan tugas rutin, seperti patroli tepat waktu, memeriksa akses dengan ketat, dan memastikan bahwa peralatan keamanan berfungsi dengan baik. Pengawasan dan penilaian berkala juga membantu memastikan bahwa setiap anggota tim tetap patuh terhadap aturan. Disiplin adalah inti dari pekerjaan kami. Keamanan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mental dan kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab dengan ketat. Bagi mereka yang bergabung dengan tim keamanan, penting untuk menghargai nilai disiplin, mematuhi pedoman yang ada, dan selalu berusaha menjadi contoh yang baik dalam menjaga keamanan.”

Disiplin membantu mengurangi peluang kesalahan manusia yang dapat mengancam keamanan. Ketika tugas-tugas rutin dijalankan dengan disiplin, risiko kelalaian atau kelelahan dapat diminimalkan. Disiplin membantu perusahaan dalam mengelola risiko dengan lebih baik. Dengan mengikuti protokol keamanan dan menjalankan tugas dengan konsistensi, perusahaan dapat mengurangi potensi risiko pencurian aset PT KKA. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak kepolisian beliau mengatakan:

“Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya disiplin dan dampak positif yang dihasilkan. Mengatasi kelelahan atau kurangnya motivasi juga dapat menjadi tantangan, terutama saat menghadapi rutinitas yang berulang. Oleh karena itu, kami memulai dengan memberikan pelatihan mendalam kepada anggota tim tentang pentingnya disiplin dalam keamanan. Kami menjelaskan dampak dari pelanggaran protokol keamanan dan konsekuensinya terhadap keselamatan perusahaan dan individu. Selain itu, kami melakukan pengawasan rutin, memberikan umpan balik terhadap kinerja, dan memberikan penghargaan untuk kepatuhan terhadap disiplin.”

Berdasarkan wawancara ini dapat diketahui bahwasanya memberikan penghargaan dan punishment dalam menjaga kedisiplinan para petugas keamanan sangatlah penting. Jika anggota tim merasa bahwa usaha

dan kedisiplinan mereka tidak dihargai atau diakui, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk mematuhi protokol keamanan.

Berdasarkan dari fungsi penerapan disiplin, bahwa disiplin membantu mencegah pelanggaran keamanan dengan mengharuskan setiap individu, termasuk anggota tim keamanan sendiri, untuk mematuhi protokol dan pedoman keamanan yang telah ditetapkan. Hal ini membantu mengurangi risiko potensi ancaman dan akses yang tidak sah. Dengan disiplin, anggota tim keamanan terbiasa dengan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Mereka siap merespons dan terbiasa menjalankan tugas dengan konsistensi. Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak SM selaku Kepala Divisi Operasi 1 beliau mengatakan:

“Disiplin memegang peranan krusial dalam menjaga keamanan aset perusahaan kami. Setiap anggota tim keamanan harus mentaati prosedur keamanan dan aturan yang telah ditetapkan. Disiplin memastikan bahwa setiap tugas, mulai dari patroli hingga pemantauan akses keluar masuk dilakukan secara konsisten dan efektif. Tanpa disiplin, risiko keamanan dapat meningkat karena adanya celah atau kelalaian.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak SM selaku Kepala Divisi Operasi 1, kedisiplinan sangat penting untuk diterapkan oleh pihak keamanan dalam menjaga aset PT KKA. Fungsi disiplin dalam konteks menjaga keamanan perusahaan memiliki peran krusial dalam membangun fondasi yang kokoh untuk keselamatan dan kelangsungan operasional. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga menciptakan budaya yang mendukung keamanan dan memberikan dasar untuk respon yang cepat dan efektif terhadap situasi krisis.

Dengan merangkul fungsi disiplin, organisasi menciptakan fondasi yang kokoh untuk menjaga keamanan perusahaan. Keberlanjutan dan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman menjadi mungkin melalui budaya disiplin yang melibatkan seluruh anggota organisasi dalam menjaga keamanan sebagai prioritas utama. Disiplin bukan hanya prinsip, tetapi suatu kebutuhan esensial dalam menjaga keberlanjutan dan integritas perusahaan dalam situasi apapun. Peran serta fungsi dari kedua belah pihak sangat berkaitan namun tetap dibutuhkan sebuah lembaga yang mengawasi kinerja dari kedua belah pihak sehingga terdapatnya keserasian dalam melaksanakan pola atau tindakan yang sudah di rencanakan agar tetap sesuai dengan kesepakatan.

Koordinasi PT Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero Dan Kepolisian Resort Lhokseumawe harus lebih memperhatikan kesatuan tindakan terkait dengan kesadaran bagi anggota instansi untuk lebih bisa menyesuaikan diri dengan instansi lain. Komunikasi yang lebih intens guna mempermudah melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Pembagian kerja yang lebih detail sehingga tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Serta kedisiplinan yang lebih tegas sehingga terciptanya lingkungan kerja yang baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya Koordinasi PT Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero Dan Kepolisian Resort Lhokseumawe Dalam Pengamanan Aset Perusahaan dengan menggunakan indikator Koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan, dapat disimpulkan bahwa Kesatuan Tindakan berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses kesatuan tindakan yang dilakukan antara PT KKA dan Kepolisian Resor Lhokseumawe terjadi ketidaksadaran dalam bekerja, dimana beberapa pihak keamanan PT KKA yang bertugas terlalu sering tidak merespons permintaan informasi dari pihak Kepolisian Resor Lhokseumawe menimbulkan ketidaksempurnaan dalam melakukan koordinasi. Untuk komunikasi, di hasil penelitian ini bahwa komunikasi yang terjalin harus benar-benar terjalin dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Tidak hanya pada antara instansi juga pada satu tim regu yang bertugas. Komunikasi yang terjalin antar anggota harus berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman atau *miss communication*. Untuk Pembagian Kerja dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Kertas Kraft Aceh dapat diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan yang terjadi dilapangan oleh kedua instansi tersebut. Timbulnya permasalahan di atas diduga disebabkan karena masih kurangnya pembagian kerja yang dilakukan oleh kepala bagian. Dan untuk disiplin, dalam hal menjaga keamanan perusahaan adalah penerapan dan pematuhan terhadap kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. Dengan menetapkan aturan dan prosedur yang jelas terkait dengan keamanan, organisasi menciptakan norma yang harus diikuti oleh seluruh anggota.

Referensi

Buku

- Moenir, (2002), Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. *Jakarta : Bumi Aksara.*
- Akbar. (2010). Manajemen Taman Milik pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan manajemen Aset. *Bandung: Institut Teknologi Bandung.*
- Alfian, Ibrahim. (1985). "Sejarah dan Permasalahan Masa Kini". Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Bharata. (2003). Dasar- Dasar Pelayanan Prima. *Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.*
- Daryanto. (2014). Konsumen dan pelayanan prima. *Yogyakarta: Gava Media*
- Gaspersz, Vincent. (2011). Total Quality Management (untuk Praktisi Bisnis dan Industri). *Jakarta: Penebar Swadaya.*
- Griffin, R.W. (2004). "Manajemen". *Jakarta: Erlangga.*
- Handyaningrat, (1989). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. *Jakarta. PT Gunung Agung.*
- Handyaningrat. (2011). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. *Jakarta: CV. Haji Masagung.*
- Handoko. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jakarta: Bumi Aksara.*
- Handoko. (2003). Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Hariyono, T. (2007). Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah. *Jakarta: PT Bumi Aksara.*
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jakarta: PT Bumi Askara.*
- Moenir, (2002), Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. *Jakarta : Bumi Aksara.*

Jurnal

- Akbar., Lukman. (2010). Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan Manajemen Aset. *Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil.*
- Andrianto. (2018). Peran Pengelolaan Aset Desa : Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi.* 23(2)
- Ihsan, F. (2018). Koordinasi Pemerintah dalam Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah.* 16(2). :81-164
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan.* 5(1). 199-212.
- Sutrisno., Mei. (2004). An Investigation of Participation Project Appraisal in Developing Countries Using Elements of Value an Risk Management . *Manchester: University of Manchester Institute.*
- Tasane, K.M. (2019). Pentingnya Koordinasi Terhadap Penggunaan Keuangan Desa Dan Aset Desa Pada Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire. *Jurnal Ilmu Pemerintahan.* 1(1)

Peraturan Perundang-Undangan

- PAN Nomor 63/ KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara,
- Undang-Undang No. 19 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).